

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL**

- Nama Organisasi : Dinas Sosial
Jabatan : Kepala Dinas
Tugas : a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial.
b. Menetapkan program, kegiatan, standart operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial .
c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparaturnya dalam lingkup Dinas Sosial.
e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial.
g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil - hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Sosial.
i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi dinas urusan pemerintah daerah di bidang sosial.
j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepala dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial.
k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang sosial.
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah.
- Fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial. .
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2025**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	MAKNA INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal	Mengidentifikasi besaran jumlah kenaikan PPKS menjadi mandiri. <u>Kriteria mandiri :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengakses rumah sehat • Dapat mengakses pangan 3 x sehari • Berpenghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal • Memiliki akses bagi Anak usia sekolah • Memiliki akses kesehatan dasar • Dapat mengaplikasikan hasil pelatihan keterampilan berusaha yang diberikan pada kehidupan sehari-hari • Dari keterampilannya tersebut mampu menghasilkan/berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal 	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar / Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Batola dikalikan seratus Jumlah Pemerlu Pelayanan	Kepala Dinas	Pemutakhiran Data PPKS oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di setiap Kecamatan.
2.	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha			Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mampu Berusaha / Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Menjadi Sasaran Berusaha dikalikan seratus		

					Nilai SAKIP = (Perencanaan Kinerja) + (Pengukuran		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	Peningkatan Nilai SAKIP belum optimal	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) meliputi Perencanaan Kinerja. Ruang lingkup Evaluasinya meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Kualitas Perencanaan Kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan • Penilaian Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja • Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan 	Kinerja) + (Pelaporan Kinerja) + (Evaluasi Kinerja) + (Capaian Kinerja). Dari hasil nilai tersebut akan dikategorikan pada predikat penilaian SAKIP	Kepala Dinas	Dokumen Perencanaan (LKIP, Matriks, PK dan DPA)

				<p>dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</p> <ul style="list-style-type: none">• Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja• Penilaian Capaian Kinerja atas <i>output</i> maupun <i>outcome</i> serta kinerja lainnya			
--	--	--	--	---	--	--	--

Marabahan, 23 April 2025

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Barito Kuala,**



H. JAYA HIDAYATULLAH, S.Sos
NIP. 19750615 199503 1004